



KR-Antara/Pendam XVII/Cenderawasih

**MINAT JADI PRAJURIT TNI: Sejumlah remaja asli orang Papua di Kabupaten Mimika sedang didata menjadi calon prajurit TNI AD. Menurut Babinsa Koramil 1710-02/Timika Serda Rusdin Wali, minat remaja asli Papua untuk menjadi prajurit TNI AD di Kabupaten Mimika cukup tinggi. Hal itu, bisa dilihat dari jumlah pendaftar prajurit TNI AD di wilayah Papua pada saat dibuka pendaftaran untuk calon Bintara PK TA 2021. "Saya mengajak remaja putra dan putri untuk mendaftar, karena peluang menjadi calon bintara terbuka luas bagi anak-anak Papua," ujar Serda Rusdin.**

## FH UNIMMA GAGAS UNIMMA-IUPL Program Internasional untuk Mahasiswa

**MAGELANG (KR)** - Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Magelang (Unimma) membuat program 'Unimma International Undergraduate Program of Law' (Unimma-IUPL). Program internasional ini, untuk mahasiswa semester dua yang disaring masuk ke kelas internasional.

Demikian dikemukakan Ketua Program Studi (Kaprod) Ilmu Hukum Unimma Chrisna Bagus Edhita SH MH, Kamis (15/7). Dikatakan Chrisna, semua program Unimma-IUPL menggunakan pengantar Bahasa Inggris dengan beberapa program unggulan, antara lain *Motivation Week, Joint Visiting Professor, Joint Seminar, Joint Conference, International Community services* dan *Joint Culture Camp*.

"Tantangan global dunia hukum sangat keras, saat ini konsultasi hukum sudah mulai menggunakan *Artificial Intelligence (AI)*. Mahasiswa harus menguasai teknologi informasi, termasuk komunikasi Bahasa Inggris," kata Chrisna sambil mengatakan, program ini untuk mencapai profil lulusan mahasiswa yang sudah ditetapkan oleh

kurikulum program studi hukum.

Tujuan lain dari Unimma-IUPL adalah penguasaan prinsip, teori dan norma hukum, baik lingkup nasional maupun internasional. Mahasiswa dapat berperan aktif dalam pengembangan dan kualitas Catur Dharma melalui internasionalisasi, menghasilkan ahli hukum advokasi yang berwawasan global dan meningkatkan kemampuan mahasiswa agar dapat bersaing di tingkat internasional untuk kepentingan nasional.

Pejabat Rektor Unimma Dr Lilik Andriyani SE MSi menyampaikan rasa syukur dan bangganya terhadap program tersebut. "Ini salah satu embrio kelas internasional di Unimma, yang akan disusul prodi lain," kata Dr Lilik.

Unimma-IUPL kini bekerja sama dengan beberapa universitas luar negeri, diantaranya University of Malaya (Malaysia), Asia University (Taiwan), Polytechnic University of the Philippines (Philippines), Khon Khaen University (Thailand), Coventry University (UK) dan Varna University (Bulgaria). **(Tha)-d**

## SEKOLAH MENUNGGU SOSIALISASI

# Vaksinasi untuk Usia 12-17 Tahun

**YOGYA (KR)** - Vaksinasi Covid-19 untuk usia 12-17 tahun diharapkan bisa mengurangi penularan virus Korona di kalangan anak-anak. Di sisi lain, vaksinasi ini memberi dampak yang baik apabila diterapkan pembelajaran tatap muka (PTM), sehingga proses pembelajaran berlangsung nyaman.

Pihak sekolah berharap informasi vaksinasi untuk anak terdapat sosialisasi yang jelas.

"Kami mendukung program vaksinasi bagi anak yang sedang digencarkan pemerintah. Karena, se-

lain sebagai upaya mencegah terjadinya penularan, diharapkan siswa bisa merasa percaya diri dalam mengikuti PTM," ujar Kepala SMAN 9 Yogyakarta, Drs Jumadi MSi, Jumat (16/7).

Mengingat informasi tentang vaksinasi ini cukup penting, ia berharap segera ada sosialisasi resmi dari pihak terkait ke sekolah. Hal senada diungkapkan Kepala SMAN 10 Yogyakarta, Sri Murni.

Menurut Sri Murni, sebagai pelaksana di lapangan pihaknya menyambut baik program vaksinasi untuk anak 12-17 tahun. Vaksinasi diyakini menjadi cara tepat menekan penularan kasus yang saat ini mengkhawatirkan.

Sekolah berharap ada sosialisasi detail, sehingga jika diminta menjelaskan kepada siswa maupun orangtua, bisa dilakukan dengan baik. **(Ria)-d**

## PADA ZAMAN SOEKARNO

# Patronase Politik Munculkan 'Ali-Baba'

**SLEMAN (KR)** - Patronase politik telah ada di berbagai negara. Para politisi berusaha mempengaruhi perusahaan untuk tujuan politik mereka. Di Indonesia patronase politik mempunyai sejarah panjang. Diawali sejak Presiden Soekarno memberikan perlindungan kepada para pengusaha pribumi atas dominasinya pengusaha China (Tionghoa) dan perusahaan Belanda.

Dosen Universitas Mulawarman La Ode Ahmad Safar Tosungku mengemukakan hal tersebut ketika mempertahankan disertasi berjudul 'Struktur Modal dan Patronase Politik di Indonesia', Kamis (15/7) di Kampus FBE UII Condongcatur. Dengan promotor Prof Dr Hadri Kusuma MBA, co-promotor I Dr Zaenal Arifin MSi dan co-promotor II Dr D Agus Hardjito MSi, La Ode Ahmad Safar Tosungku adalah doctor lulusan ke-97 FBE dan ke-260 UII.

Disebutkan La Ode, berbagai contoh patronase politik di berbagai negara, misal perusahaan milik Daim Zainuddin di Malaysia yang mendapat bantuan pinjaman karena kedekatannya dengan PM Mahatir Muhammad. Se-

dangkan, PM Rusia Boris Yeltsin menyetujui keringanan pajak kepada perusahaan Norisk Nikel. "Di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno salah satu bentuk patronasenya adalah Program Benteng. Ciri khas program ini yakni adanya pejabat atau mantan pejabat ikut dalam dunia bisnis. Para pejabat tersebut mendapat hak istimewa berupa lisensi atau kontrak impor untuk menjadi modal bagi pengusaha pribumi," tandas alumnus Teknik Industri UII 1997 ini.

Namun menurutnya, Program Benteng ini gagal, karena yang terjadi pengusaha pribumi menjual lisensi impor kepada pengusaha Tionghoa.

"Penjualan lisensi impor kepada pengusaha Tionghoa memunculkan praktik 'Ali-Baba'. Ali sebagai simbol pengusaha pribumi sedangkan Baba sebagai simbol pengusaha Tionghoa. Pengusaha pribumi sebagai pemegang lisensi kadang mendapat imbalan berupa jabatan direktur pada perusahaan Tionghoa," ujar PNS kelahiran Wakuru 11 April 1971 ini.

Pada masa Presiden Soeharto lanjutnya, patronase politik tidak berkurang. Keterkaitan Presiden Soeharto dengan berbagai kelompok pengusaha seperti Bob Hasan melalui Nusamba Grup, Liem Sioe Liong melalui Salim

Grup dan Prajogo Pangestu melalui Barito Pasifik Grup merupakan bukti adanya patronase politik pada masa pemerintahannya.

Di era pemerintahan Presiden Habibie (1998) sampai Presiden Megawati tahun 2004 memiliki gejala politik yang tidak stabil. Baru pada pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono mulai ada kestabilan politik. Pada masa ini bermunculan pengusaha merambah dunia politik dan menjadi ketua partai politik.

Dengan asumsi, bahwa BUMN adalah patron politik maupun asumsi BUMN bukan patron politik, rezim SBY memiliki porsi utang yang lebih besar daripada rezim Joko Widodo jika *proxy* yang digunakan adalah utang jangka panjang dibagi total aset.

"Namun jika menggunakan *proxy* utang jangka panjang dibagi ekuitas, kedua rezim tersebut tidak berbeda porsi utangnya," tambah La Ode.

Ketika BUMN dianggap patron, sebut Dosen Universitas Mulawarman ini, patron politik koalisi pemerintah berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Hasil ini berarti ketika perusahaan berpatron politik koalisi utang perusahaan menurun karena patronase politik koalisi berpotensi *rent seeking*. **(Fsy)-d**

## EKONOMI

### Pertamina Vaksin Petugas SPBU dan AMT

**YOGYA (KR)** - PT Pertamina (Persero) di Regional Jawa Bagian Tengah (JBT) mengikutsertakan 500 petugas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Awak Mobil Tangki (AMT) dalam program vaksinasi Covid-19. Hal ini sebagai bentuk dukungan Pertamina dalam program vaksinasi yang dicanangkan pemerintah yang mengintegrasikan Dinas Kesehatan (Dinkes) Yogyakarta bekerjasama dengan Rumah Sakit (RS) Siloam mulai 13 Juli 2021 hingga 9 hari kedepan.

Salah satu peserta vaksin, AMT di Fuel Terminal Rewulu Supri mengaku setiap hari dirinya berinteraksi dengan banyak orang dan ada kekhawatiran tertular virus Korona. "Adanya vaksinasi ini membuat saya tidak khawatir setidaknya bisa menambah imun bagi tubuh," ujarnya di Atrium Lippo Mall Yogyakarta, Jumat (16/7).

Unit Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Regional JBT Brasto Galih Nugroho menjelaskan, sebagai garda depan pelayanan energi, para petugas SPBU dan AMT banyak berinteraksi dengan konsumen dan stakeholder. Untuk itu, pihaknya menggelar vaksinasi Covid-19 bagi 500 petugas SPBU dan AMT di wilayah DIY dan sekitarnya. Jumlah tersebut akan dibagi dalam 10 hari dengan jumlah per hari sebanyak 50 orang petugas SPBU dan AMT.

"Vaksinasi Covid-19 yang diberikan kepada petugas SPBU dan AMT diharapkan dapat mempercepat upaya pemulihan pandemi. Selain itu, kami memberikan kenyamanan dalam pelayanan terhadap konsumen karena para petugas kami telah divaksin," tegasnya. **(Ira)**

### BCA Syariah Jadi BPS BPIH

**JAKARTA (KR)** - PT Bank BCA Syariah (BCA Syariah) melanjutkan kerja sama dengan BPKH dengan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) periode tahun 2021-2024. BCA Syariah akan tetap memberikan dukungan terhadap program-program yang dijalankan BPKH diantaranya dengan bersinergi untuk menyukseskan Program Haji Muda serta mendukung peningkatan pelayanan haji Indonesia melalui sinergi dengan BPS BPIH, BCA sebagai induk usaha dan BPKH.

"BCA Syariah kembali terpilih menjadi BPS BPIH untuk melaksanakan fungsi Penerima, Penempatan dan Mitra Investasi biaya haji," kata Direktur BCA Syariah Pranata pada penandatanganan kerja sama secara virtual dengan Kepala Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu di Jakarta, Kamis (15/7).

Dalam penandatanganan kerja sama ini, BPKH kembali menetapkan beberapa hal di antaranya 30 Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) untuk melaksanakan fungsi sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH), 28 Bank Syariah/UUS sebagai Bank Penempatan, 24 Bank Syariah/UUS sebagai Bank Mitra Investasi, 18 Bank Syariah/UUS sebagai Bank Pengelola Nilai Manfaat, 7 Bank Syariah/UUS sebagai Bank Pengelola Likuiditas, dan 1 Bank Syariah sebagai Bank Operasional. **(Lmg)**

## OKUPANSI HANYA SAMPAI 6 PERSEN

# Terpukul PPKM Darurat, Bisnis Perhotelan Butuh Solusi

**YOGYA (KR)** - Bisnis perhotelan baik bintang maupun nonbintang serta restoran di DIY sangat terpukul dengan diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa Bali sejak 3 sampai 20 Juli 2021. Akibatnya dapat terlihat dari penurunan tingkat hunian atau okupansi hotel baik bintang dan nonbintang di DIY yang sangat tajam hanya di kisaran 0 sampai dengan 6 persen.

Ketua BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY Deddy Pranono Eryono mengatakan, kebijakan PPKM Darurat ini menerapkan pengetatan di beberapa ruas jalan baik di luar maupun di dalam DIY mengakibatkan penurunan okupansi. Dengan berbagai aturan dalam PPKM Darurat tersebut, capa-

ian tingkat hunian hotel di DIY hanya di kisaran 0 hingga 6 persen.

"Okupansi perhotelan di DIY hanya mampu mencapai maksimal 6 persen. Dengan kondisi ini kita sudah tidak mempunyai strategi apa pun yang bisa berhasil. Kita kini tinggal memikirkan urusan ke dalam yaitu efisiensi baik operasi-

nal maupun tenaga kerja," paparnya kepada *KR* di Yogyakarta, Jumat (16/7).

Deddy mengakui, mayoritas pengusaha hotel dan restoran di DIY memilih merumahkan tenaga kerjanya saat ini. Dirinya pun memprediksi ada yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), namun belum ada laporan masuk kepada BPD PHRI DIY sampai sekarang ini. Setiap hotel setidaknya merumahkan 5 hingga 40 karyawan tergantung jumlah kamar maupun jumlah tenaga kerja di hotel bintang maupun nonbintang di DIY.

"Kita punya 400-an anggota termasuk restoran, padahal yang sekarang mam-

pu bertahan hidup hanya 200-an anggota. Ini sangat berat bagi kami semua, kita memang mendukung program PPKM Darurat tersebut, tapi kalau kebijakan ini diperpanjang harus ada solusi bagi bisnis perhotelan maupun restoran di DIY demi keberlangsungan hidup," ungkap General Manager Hotel Ruba Grha Yogyakarta ini.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DIY Sugeng Arianto mengungkapkan, pandemi Covid-19 yang melanda sejak awal 2020 berdampak pada Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang

maupun nonbintang di DIY sampai sekarang. Okupansi hotel bintang di DIY mencapai sebesar 32,27 persen, mengalami penurunan sebesar 4,51 poin pada Mei 2021 dibandingkan TPK bulan sebelumnya yang tercatat 36,78 persen.

"TPK hotel nonbintang di DIY sebesar 11,73 persen selama Mei 2021, mengalami kenaikan sebesar 2,05 poin dibandingkan TPK April 2021. Rata-rata lama menginap tamu di hotel bintang mencapai angka 1,51 hari dan hotel non bintang mencapai 1,21 hari pada Mei 2021," imbuh Sugeng. **(Ira)**

## Karyawan dan Keluarga CCEP Divaksin



KR-Istimewa

**Kharyawan CCEP Indonesia dan keluarganya menjalani vaksinasi Covid-19.**

**UNGERAN (KR)** - Ratusan karyawan Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) Indonesia dan keluarganya di Kabupaten Semarang menjalani vaksinasi Covid-19. Kegiatan itu bagian dari kegiatan 'Serbuan Vaksinasi' yang diselenggarakan oleh Kodam IV/Diponegoro, Kodim 0714/Salatiga, dan Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi).

Perwira Seksi Teritorial (Pasiter) Kodim 0714/Salatiga Kapten CBA Kurdi mengapresiasi kerja sama tersebut. "Terima kasih pada Coca-Cola atas dukungan pada upaya vaksinasi pada masyarakat ini," katanya, Jumat (16/7).

Regional Corporate Affairs Manager-East CCEP Indonesia Armytanti Hanum Kasmito menyatakan, kolaborasi antarpihak dan kepatuhan pada protokol kesehatan menjadi kunci keberhasilan mengatasi pandemi. Karenanya, pihaknya berterima kasih pada pihak TNI dan Walubi yang telah memfasilitasi akses vaksin bagi karyawan dan keluarganya. "Kami yakin jalan keluar dari pandemi ini adalah dengan meningkatkan kolaborasi banyak pihak, dari pemerintah, kalangan swasta, dan masyarakat," ungkapnya. **(Ria)**